

**ANALISIS FENOMENA *FLYPAPER EFFECT* DI PROVINSI NUSA  
TENGGARA BARAT (NTB) TAHUN 2014-2018**

**RINGKASAN SKRIPSI**



**GABRIELLA ANGELINA ABIDANO**

**1116 29116**

**PROGRAM STUDI AKUTANSI  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YAYASAN  
KELUARGA PAHLAWAN NEGARA  
YOGYAKARTA**

**2020**

## HALAMAN PERNYATAAN ORSINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa Skripsi dengan judul :

### **ANALISIS FENOMENA *FLYPAPER EFFECT* DI PROVINSI NUSA TENGGERA BARAT (NTB) TAHUN 2014-2018**

Telah diajukan untuk diuji tanggal 27 Agustus 2020, adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian karya tulis orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan orang lain. Bila dikemudian hari terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, maka saya bersedia menerima pembatalan gelar dan ijazah yang diberikan oleh Program Pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta batal saya terima.

Yogyakarta, 27 Agustus 2020

Yang memberi pernyataan



Nama: Gabriella Angelina Abidano

Nim: 1116 29116

**SKRIPSI**  
**ANALISIS FENOMENA *FLYPAPER EFFECT***  
**DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (NTB) TAHUN 2014-2018**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**GABRIELLA ANGELINA ABIDANO**

**No Induk Mahasiswa: 111629116**

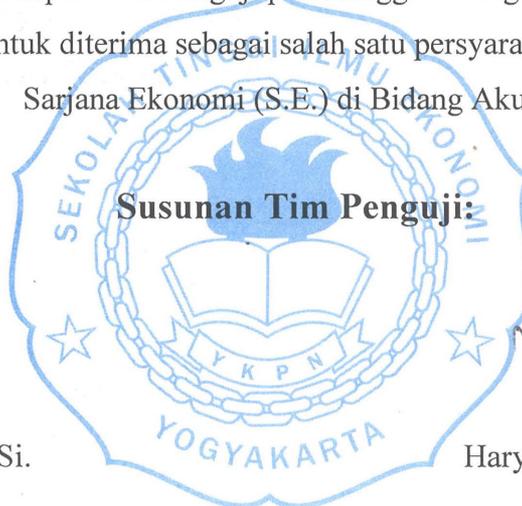
telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 27 Agustus 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) di Bidang Akuntansi.

**Susunan Tim Penguji:**

Pembimbing



Algifari, Drs., M.Si.



Penguji



Haryono Subiyakto, Dr., M.Si.

Yogyakarta, 27 Agustus 2020  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta  
Ketua



Haryono Subiyakto, Dr., M.Si.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris adanya fenomena *flypaper effect* di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai variabel independen dan Belanja Daerah (BD) sebagai variabel dependen meliputi 10 Kabupaten /Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 5 tahun dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah (BD) menggunakan model regresi data panel. Model terbaik untuk penelitian ini adalah Common Effects Model. Hasil penelitian menunjukkan Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) lebih besar pengaruhnya terhadap Belanja Daerah (BD) daripada pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD). Dengan demikian dapat disimpulkan terjadi fenomena *flypaper effect* pada Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2014 sampai 2018. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih bergantung pada dari pemerintahan pusat daripada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

**Kata kunci:** *Flypaper Effect*, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Belanja Daerah, Model Regresi Data Panel.

## ABSTRACK

*This study aims to obtain empirical evidence of the flypaper effect phenomenon in West Nusa Tenggara Province. This study uses Regional Original Income (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), and Revenue Sharing Fund (DBH) as independent variables and Regional Expenditure (BD) as the dependent variable covering 10 Regencies / Cities in the Province. West Nusa Tenggara for 5 years from 2014 to 2018. To test the effect of Regional Original Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), and Revenue Sharing Fund (DBH) on Regional Expenditure (BD) ) using a panel data regression model. The best model for this research is Common Effects Model. The results showed that the effect of General Allocation Funds (DAU), Special Allocation Funds (DAK), and Revenue Sharing Funds (DBH) has a greater influence on Regional Expenditures (BD) than the influence of Regional Owned Revenue (PAD) on Regional Expenditures (BD). Thus, it can be concluded that there was a flypaper effect phenomenon in the regencies/cities of West Nusa Tenggara Province from 2014 to 2018. This shows that the regional governments of regencies/cities in West Nusa Tenggara Province still depend on the central government rather than Regional Original Income (PAD).*

**Keywords:** *flypaper effect, Regional Original Income, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, and Revenue Sharing Fund, Regional Expenditure.*

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## 1. PEMBAHASAN

Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki 17.504 pulau, serta memiliki jumlah penduduk kurang lebih dua ratus tujuh puluh juta jiwa di tahun 2018. Indonesia juga menjadi salah satu negara yang termasuk dalam kelompok negara yang sedang berkembang, sehingga butuh perhatian khusus terhadap perkembangan Pemerintahan Pusat maupun Pemerintahan Daerah. Desentralisasi Fiskal, adalah pemberian kekuasaan dan kewenangan dari Pemerintahan Pusat kepada Pemerintahan Daerah, untuk meningkatkan kemandirian perekonomian daerah. Tujuan desentralisasi fiskal, adalah meningkatkan, serta memperbaiki kuantitas, kualitas layanan publik, menaikkan kesejahteraan masyarakat dan menyokong pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah menyangkut penyediaan dana yang memadai dengan menempuh dana perimbangan antara pusat, serta daerah. Tujuan otonomi daerah, yaitu menaikkan pelayanan untuk masyarakat, serta memajukan pembangunan.

Di dalam APBD, ada anggaran dan biaya yang terdiri dari anggaran belanja, anggaran pendapatan serta anggaran pembiayaan. Anggaran pendapatan dalam APBD, disusun dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Pendapatan lainnya. Peraturan Undang-undang no 33 tahun 2004 mengatur Pendapatan Asli Daerah, PAD berasal dari pendapatan pajak, pendapatan retribusi daerah, pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan daerah asli lainnya. PAD yang dimiliki suatu daerah tinggi, maka anggaran pendapatan dimiliki daerah menjadi meningkat, serta pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhannya. PAD juga menunjukkan seberapa besar daerah tersebut bergantung pada pemerintah pusat. Jika daerah tersebut memiliki PAD yang tinggi, maka daerah tersebut tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat rendah.

Sumber pendapatan APBD lainnya, yaitu Dana Perimbangan. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH). Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari transfer yang dikirimkan oleh pusat kepada daerah, dengan tujuan untuk meminimalkan ketimpangan fiskal setiap daerah-daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari Transfer yang dikirimkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dengan tujuan untuk membiayai program, serta kegiatan khusus daerah, yang sesuai dengan pemerintahan pusat. Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang berasal dari transfer yang dikirimkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sesuai persentase kebutuhan daerah tersebut menjalankan desentralisasi.

Setiap daerah mempunyai kebijakan dan respon yang berbeda-beda terhadap kebijakan otonomi daerah, dan desentralisasi fiskal dalam meningkatkan kemandirian. Ketidakmampuan suatu daerah untuk menetapkan kemandirian terlihat jelas dari dana transfer rutin yang didapat dari pemerintah pusat. *Flypaper effect* adalah suatu peristiwa meningkatnya penggunaan dana transfer yang diterima dari pemerintahan

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pusat daripada menggunakan pendapatan asli daerah untuk membiayai program dan belanja daerah. Fenomena *Flypaper Effect* terjadi akibat respon yang berbeda oleh pemda dalam penggunaan dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat. Jika suatu daerah membiayai program daerah dengan mengandalkan Dana Perimbangan, daripada PAD, maka peristiwa ini disebut *Flypaper Effect*. Permasalahan yang terjadi jika pemda terlalu bergantung kepada dana perimbangan untuk Belanja Daerah tanpa mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki, sehingga pemda tidak menjadi lebih mandiri malah semakin bergantung pada dana perimbangan. Permasalahan yang disebabkan karena peranan dominan dana transfer pusat dalam keuangan pemerintah daerah telah memicu terjadinya *flypaper effect* (Muid dan Saputri, 2014) berkaitan PAD serta DAU mempengaruhi belanja daerah Jawa Tengah periode 2012-2013, menghasilkan kesimpulan antara PAD dan DAU terjadi *Flypaper Effect* terhadap belanja daerah. Pada tahun 2010 Pramuka meneliti *Flypaper Effect* untuk daerah Jawa periode 2005-2008, menghasilkan kesimpulan bahwa PAD lebih banyak digunakan dari pada DAU, maka tidak terjadi fenomena *Flypaper Effect*.

Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah salah satu daerah di Indonesia, yang terletak di barat Kepulauan Nusa Tenggara. Penelitian ini memilih Provinsi NTB dikarenakan daerah tersebut memiliki tempat-tempat wisata yang sangat menarik, menjadi destinasi yang diminati wisatawan lokal maupun mancanegara. Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi salah satu lokasi penghasil mutiara yang indah, masyarakat di sana mengekspor mutiara ke berbagai negara. Nusa Tenggara Barat (NTB) juga memiliki puluhan perusahaan pertambangan asing maupun lokal pada tahun 2016. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pengujian berjudul “Analisis Fenomena *Flypaper Effect* Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2014-2018”.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

### Teori Otonomi Daerah

Pemerintahan Indonesia menggunakan sistem otonomi daerah yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, dan kemudian dirubah kembali dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014. Dikarenakan adanya perubahan perkembangan ketatanegaraan, serta bertambahnya tuntutan pemerintahan daerah, diperbaharui dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 2015. Otonomi Daerah menciptakan daerah saat ini lebih mandiri dalam mengatur, serta mengelola kepemilikan daerah berupa sumberdaya serta bentuk penerimaan, dan pembiayaan dengan tidak hanya bergantung dana Pemerintah pusat.

### Dana Alokasi Umum

Pemerintahan Nomor 55 Tahun 2005 menjelaskan DAU merupakan dana yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan setiap daerah agar mampu mendanai setiap kebutuhan daerah dalam kegiatan desentralisasi. *Fiscal Gap* sebuah metode

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pendekatan yang dipakai untuk menentukan kebutuhan DAU suatu wilayah, dengan menentukan dari jumlah kebutuhan daerah, dan potensi yang dimiliki daerah. DAU memiliki sifat “*Block Grant*”, yang artinya Penggunaan DAU suatu daerah bisa secara bebas memanfaatkan sesuai kebutuhan, dan kepentingan setiap daerah.

## **Dana Alokasi Khusus**

Alokasi DAK dilakukan sejak Otonomi Daerah dilaksanakan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang membahas Perimbangan Keuangan Pusat dengan Daerah, telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 yang membahas juga Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah, dan PP Nomor 55 Tahun 2005 membahas tentang Dana Perimbangan. Dalam perhitungan DAK dilakukan dengan 2 tahap, yakni penentuan daerah tertentu yang menerima DAK dan penentuan besaran alokasi DAK di setiap daerahnya.

## **Dana Bagi Hasil**

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana pendapatan APBN yang dipergunakan untuk mengalokasikan kepada suatu daerah tertentu dengan angka persentase yang membutuhkan dana untuk pelaksanaan desentralisasi. Mengalokasikan DBH dengan tujuan untuk mengatur keselarasan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah sesuai potensi daerah penghasil. Saat membagikan DBH kepada setiap daerah sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, dan menyalurkan DBH dengan menggunakan prinsip *Based On Actual Revenue* atau berdasarkan pendataan suatu negara yang dibagihhasilkan pada tahun anggaran berjalan. Menyalurkan DBH diatur dalam Pasal 23 Undang-undang 33 tahun 2004, menyalurkan DBH dengan dasar relisasi pendapatan tahun anggaran berjalan.

## **Pendapatan Asli Daerah**

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu pendapatan setiap daerah yang berasal dari pungutan daerah yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sumber-sumber pendapatan Pendapatan Asli Daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan, serta pendapatan sah lainnya.

## **Belanja Daerah**

Belanja Daerah merupakan bantuan yang berasal dari rekening kas umum setiap daerah dikurangi ekuitas dana, yang digunakan untuk membiayai seluruh pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 pasal 23 ayat 2. Pelaksanaan Otonomi daerah, maka pemerintah menerima wewenang serta urusan yang ada didalam pemerintahan daerah tersebut.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Belanja Daerah merupakan berbagai urusan mencakup urusan wajib/pilihan, maupun urusan yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Belanja Daerah merupakan bagian dari komponen penyusunan APBD, berupa semua pengeluaran-pengeluaran untuk program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 mengelompokkan belanja daerah menjadi Belanja Daerah Tidak Langsung maupun Belanja daerah Langsung.

## *Flypaper Effect*

*Flypaper Effect* atau disebut dengan kertas terbang saat ini sering dijumpai dalam masalah pengelolaan keuangan daerah, *Flypaper Effect* adalah suatu kondisi dimana pemerintah daerah lebih banyak menggunakan dana transfer dari pemerintahan pusat daripada hasil pendapatan asli daerah tersebut untuk membiayai kegiatan daerah. Kondisi *Flypaper Effect* mengakibatkan daerah tersebut tidak mandiri, sehingga pengeluaran daerah cenderung lebih banyak dibanding dengan pemasukan asli daerah itu sendiri dengan cenderung meminta bantuan kepada pemerintahan pusat.

## 3. Pengembangan Hipotesis

### **Pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah**

Pendapatan asli daerah yakni salah satu bagian dari komponen penyusunan APBD juga merupakan sumbernya pendanaan bagi Pemerintahan daerahnya yang berasal dari potensi wilayah tersebut untuk mendanai program kegiatan belanja daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasal 3 ayat 1 Nomor 33 tahun 2004, yang menjelaskan tentang prinsip PAD kebijakan perimbangan keuangan dipertegas dengan tujuan PAD tersebut. PAD merupakan dana yang digunakan dengan tujuan memberikan kewenangan kepada pemerinah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah itu sendiri dan juga sebagai perwujudan terlaksananya desentralisasi. Daerah tersebut diharapkan dapat menggali potensi daerahnya bertujuan untuk meningkatkan PAD dan mampu membuat PAD pendapatan utama daerah tersebut. Penelitian pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah telah diteliti oleh Pramuka (2010), Sasana (2011), Devita, Delis dan Junaidi (2014), Armawaddin, Rumbia, dan Afiat (2017), dan Ferdiansyah, Deviyanti, dan Pattisahisuwa (2018) menunjukkan jika penelitian tersebut telah melakukan kajian berfokus pada pengaruh yang dimiliki oleh PAD terhadap Belanja Daerah, PAD mempunyai pengaruh signifikan dan mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Berikut uraian kesimpulan atas dasar penelitian yang dilakukan sebelumnya, sehingga dapat dinyatakan hipotesis yang diajukan, yaitu:

### **H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah**

### **Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah**

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH). Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu bagian dari dana transfer berasal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan salah satu dana transfer berasal dari salah satu pendapatan APBN yang dipergunakan untuk mengalokasikan kepada suatu daerah tertentu dengan angka persentase yang membutuhkan dana untuk pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah bertujuan membantu mendanai kegiatan khususnya urusan daerah fisik maupun nonfisik. Dengan adanya dana perimbangan bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan setiap daerah agar proses kedepannya daerah mampu membiayai kebutuhannya. DAU memiliki sifat Block Grant, yang berarti pemerintah daerah dapat menggunakan dana tersebut dengan maksimal sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah tersebut, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. DAU diberikan kepada pemerintah daerah mencakup beberapa hal seperti, perbedaan potensi antar daerah, kebutuhan daerah tersebut, serta SDA daerah tersebut dan pmdanaan yang selalu bertambah di setiap tahunnya. DBH diberikan kepada Pemerintahan daerah dengan tujuan untuk meminimalkan ketidakseimbangan kemampuan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah, serta memaksimalkan pengambilan SDA dan pendapatan pajak daerah untuk membantu meningkatkan pelayanan masyarakat. DAK bertujuan untuk membiayai pemerintahan daerah dalam program kegiatan khusus daerah tersebut, seperti meningkatkan kualitas bantuan sosial daerah salah satu contohnya memberikan bantuan Dana Bos kepada masyarakat wajib sekolah usia dini. Departemen keuangan (2009) memberitahukan bahwa setiap daerah yang memiliki potensi fiskal bernilai rendah, tetapi membutuhkan fiskal yang tinggi akan menerima DAU yang sama besarnya dengan kebutuhan fiskal daerah tersebut. Hasil penelitian Pramuka (2010), dan Ernayani (2017) menunjukkan bahwa penelitian terdahulu bahwa DAU membawa pengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Nurdini, Wiratno dan Farida (2015), Armawaddin, Rumbia dan Nur Afiat (2017), dan Fitriana dan Sudarti (2018) menunjukkan bahwa penelitian terhadap DBH membawa pengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Wiratno, Nurdini, dan Farida (2015), juga Ferdiansyah, Deviyanti serta Pattisahusiwa menunjukkan bahwa penelitian DAK tidak memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Daerah, tetapi hasil penelitian Armawaddin, Rumbia dan Nur Afiat (2017), Ernayani (2017), dan Dewi & Suyanto (2015) menunjukkan bahwa penelitian DAK memberi pengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini merumuskan hipotesis 2, hipotesis 3, dan hipotesis 4 adalah sebagai berikut:

**H2: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.**

**H3: Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.**

**H4: Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.**

### *Flypaper Effect*

Sumber pendapatan daerah berasal dari PAD, dan Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH) yang dipergunakan pihak pemerintahan daerah dalam mendanai pembiayaan belanja daerah. Pendapat tersebut dipergunakan guna memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Dalam penelitian ini, berfokus pada perbandingan apakah Dana

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Perimbangan lebih berpengaruh terhadap belanja daerah daripada PAD. Pada penelitian sebelumnya, yang diteliti oleh Pramuka (2010), menunjukkan bahwa PAD lebih berpengaruh terhadap belanja daerah daripada Dana Perimbangan, namun Nurdini, Wiratno dan Farida (2015), menunjukkan bahwa Dana Perimbangan lebih berpengaruh terhadap Belanja daerah, atau terjadinya fenomena *Flypaper Effect*.

**H5: Terdapat fenomena *flypaper effect* di Propinsi Nusa Tenggara Barat.**

## 4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Daerah Penelitian

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) disahkan pada tahun 1958 setelah disahkannya Undang-undang nomor 64 tahun 1958 pada tanggal 14 Agustus 1958. Kota Mataram merupakan Ibu Kota Provinsi NTB yang berada di Pulau Lombok. Provinsi NTB memiliki 8 kabupaten, 2 kota, dan 116 kecamatan, dengan luas wilayah sebesar 49.312,19 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk sebanyak 5.013.687 jiwa pada tahun 2018. Wilayah Kota Mataram memiliki luas wilayah 61,30 km<sup>2</sup>, dengan populasi sebanyak 419.506 jiwa yang berhasil menjadikan Kota Mataram sebagai kota terpadat di Provinsi NTB. Batasan wilayah bagian utara Provinsi NTB adalah Laut Flores dan Laut Jawa, dan Samudra Hindia menjadi batasan wilayah daerah selatan. Pada bagian Timur provinsi NTB memiliki wilayah batasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Selat Sape, dan Provinsi Bali dan Selat Lombok yang berbatasan langsung bagian barat Provinsi NTB.

### Analisis Statistika Deskriptif

**Tabel 0.1 Deskriptif Statistik (dalam jutaan rupiah)**

	<b>BD</b>	<b>PAD</b>	<b>DBH</b>	<b>DAU</b>	<b>DAK</b>
Mean	1.308.634	169.896	79.745	680.593	204.750
Maximum	2.497.167	737.781	455.854	1.162.763	546.607
Minimum	549.858	30.266	15.801	339.993	33.992
Std. Dev.	486.770	121.386	82.343	241.251	131.549
Sum	65.431.678	8.494.811	3.987.295	34.029.650	10.237.531
Observations	50	50	50	50	50

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Rerata Belanja Daerah Kota/Kabupaten pada Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2014-2018 sebesar Rp Rp1.308.633.573.099. Belanja Daerah memiliki nilai

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- maksimum yang berasal dari Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2018 sebesar Rp2.497.167.569.292. sedangkan nilai minimum Belanja Daerah sebesar Rp549.858.186.197 berasal dari Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2014. Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki standar deviasi sebesar Rp486.769.609.992.
- Pendapatan Asli Daerah Kota/Kabupaten, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2014-2019 memiliki rerata sebesar Rp169.896.239.898. Kota Bima pada berhasil mendapatkan Pendapatan Asli Daerah tertinggi di tahun 2014 sebesar Rp737.781.447.484. sedangkan di tahun 2015 Kota Bima menjadi Penghasil Pendapatan Asli Daerah terendah sebesar Rp30.266.723.064. Standar Deviasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp121.386.315.996
  - Dana Bagi Hasil Kota/Kabupaten, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2014-2019 memiliki rerata sebesar Rp79.745.913.348. Nilai maksimum Dana Bagi Hasil sejumlah Rp455.854.715.420 berasal dari Kabupaten Sumbawa Barat di tahun 2016. Sedangkan di tahun 2015 Kabupaten Lombok Utara mendapatkan nilai minimum dana bagi hasil sebesar Rp15.801.782.446. Standar Deviasi Dana Bagi Hasil sebesar Rp82.343.202.392 untuk tahun 2014-2018.
  - Dana Alokasi Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2014-2018 memiliki nilai rata-rata sebesar Rp680.593.013.994. Nilai Maksimum Dana Alokasi Umum sebanyak Rp1.162.763.206.000 dimiliki oleh Kabupaten Lombok Timur tahun 2016. Kabupaten Lombok Utara tahun 2014 mendapatkan nilai minimum Dana Alokasi Umum sebesar Rp339.993.327.000. Standar Deviasi Dana Alokasi Umum sebesar Rp241.251.197.027.
  - Rata-rata nilai Dana Alokasi Khusus Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2014-2018 sebesar Rp204.750.638.442. Nilai maksimum Dana Alokasi Khusus sebesar Rp546.607.265.848 di Kabupaten Lombok Timur tahun 2017. Pada tahun 2014 Kota Bima mendapatkan Dana Alokasi Khusus Minimum sebesar Rp33.992.090.000. Standar Deviasi yang dimiliki Dana Alokasi Khusus sebesar Rp131.549.910.132.

## Uji Chow

Rumusan hipotesis pada Uji Chow:

$H_0$  : Model regresi terbaik adalah menggunakan *Common Effect*.

$H_A$  : Model regresi terbaik adalah menggunakan *Fixed Effect*.

Menerima  $H_0$  ataupun  $H_A$ , ditentukan apabila:

Probabilitas  $F > 0,05$  : Menerima  $H_0$ , maka model CEM lebih tepat digunakan

Probabilitas  $F < 0,05$  : Menolak  $H_A$ , maka model FEM lebih tepat digunakan

**Tabel 0.2 Hasil Uji Chow**

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.255653	(9,36)	0.2940
Cross-section Chi-square	13.650497	9	0.1353

Sumber: Hasil Pengolahan Eviews

Pengujian Chow ditinjau dengan nilai probabilitas cross section chi-square, tingkat signifikan lebih besar daripada probabilitas sebesar 0,3724, kesimpulan pengujian yakni menerima  $H_A$ . Pengujian ini menunjukkan bahwa model CEM lebih cocok digunakan untuk penelitian ini, maka perlu pengujian Larange Multiplier untuk membandingkan model terbaik antara CEM dengan REM.

### Uji Lagrange Multiplier

Rumusan hipotesis untuk mengetahui model regresi mana yang terbaik, sebagai berikut:

$H_0$ : Model CEM tidak mengandung adanya masalah Otokorelasi

$H_A$ : Model CEM mengandung masalah Otokorelasi

Prob. Chi-Square > 5% : Menerima

Prob. Chi-Square < 5% : Menolak

**Tabel 0.3 Hasil Uji Lagrange Multiplier**

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.436772	Prob. F(2,43)	0.6490
Obs*R-squared	0.995525	Prob. Chi-Square(2)	0.6079

Sumber: Hasil Pengolahan Eviews

Dilihat pada table 4.5 menunjukkan bahwa nilai probabilitas 0,6079 lebih tinggi daripada tingkat signifikan 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa pengujian menerima  $H_0$ . Kesimpulan yang tepat pada pengujian ini adalah CEM tidak mengandung masalah otokorelasi. Dengan demikian hasil pengujian menunjukkan CEM merupakan model terbaik pada penelitian ini.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Multikolinieritas

Pengujian Multikolinieritas pada analisis regresi berganda dalam menguji apakah adanya keterkaitan antarvariabel independen pada penelitian. Peneliti melakukan pengujian regresi antara variabel independen dengan variabel independen lainnya

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

(*auxiliary regression*), yaitu dengan mencari nilai  $R^2$  setiap variabel independen untuk dibandingkan dengan nilai  $R^2$  CEM, yaitu sebesar 0,95295. Berikut adalah ketentuan untuk pengujian Multikolinieritas dengan menjalankan regresi *auxiliary*:

$R_1^2 < R^2$  = variabel independen tidak mengandung unsur Multikolinieritas.

$R_1^2 > R^2$  = variabel independen mengandung unsur Multikolinieritas.

**Tabel 0.4 Hasil Perbandingan  $R_1^2$  dan  $R^2$  CEM**

Model	Nilai $R_1^2$	Hasil (Lebih Besar/Lebih Kecil)
1	0.508952	Lebih Kecil
2	0.515642	Lebih Kecil
3	0.238229	Lebih Kecil
4	0.263819	Lebih Kecil

Sumber: Hasil Pengolahan Eviews

Pada Tabel 4.6 menunjukkan bahwa hasil Pengujian Multikolinieritas untuk semua variabel-variabel Independen bernilai lebih kecil dari pada Nilai  $R_1^2$  sebesar 0,95295 maka dapat ditentukan hasil pengujian menolak  $H_0$ . Pengujian menolak  $H_0$  dapat disimpulkan bahwa model CEM tidak mengandung masalah Multikolinieritas.

## Uji Heteroskedastisitas

Dilakukannya pengujian Heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat ada tidaknya perbedaan varian residual pada model regresi dalam pengamatan secara menyeluruh. Pengujian Heteroskedastisitas pada model regresi dapat dikatakan layak maupun baik, jika model regresi memperlihatkan tidak adanya masalah heteroskedastisitas. Peneliti menggunakan Uji Glesjer dalam melakukan pengujian Heteroskedastisitas, yaitu dengan mengganti variabel dependen dengan menggunakan nilai absolut residual. Pada Pengujian Glesjer ditentukan Probabilitas F ataupun Probabilitas Chi-Square yang kemudian akan dibandingkan dengan tingkat signifikan 5%, jika nilai yang dimiliki Probabilitas lebih tinggi daripada tingkat signifikan maka model regresi tidak mengandung masalah Heteroskedastisitas. Berikut hasil pengujian Heteroskedastisitas:

**Tabel 0.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

F-statistic	0.951947	Prob. F(4,45)	0.4431
Obs*R-squared	3.900799	Prob. Chi-Square(4)	0.4196

Sumber: Hasil Pengolahan Eviews

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Hasil Uji Heteroskedastisitas pada Tabel 4.7 memiliki Nilai Probabilitas F 0,4431 lebih tinggi dari tingkat signifikan 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Model Regresi tidak mengandung masalah Heteroskedastisitas. Jika dilihat dari perbandingan antara Probabilitas Chi-Square dengan Tingkat Signifikan, menghasilkan kesimpulan yang serupa yaitu Model Regresi tidak mengandung masalah Heteroskedastisitas dikarenakan nilai Probabilitas Chi-Square berhasil melampaui tingkat signifikan 5%.

## Uji Otokorelasi (*Autocorrelation*)

Uji Otokorelasi dipergunakan untuk mengetahui dan memastikan apakah suatu data terdapat penyimpangan klasik berupa korelasi antara residual pada periode waktu  $t$  dengan periode sebelumnya. Pengujian Otokorelasi pada data penelitian dengan dilakukan pengujian menggunakan nilai uji *Durbin-Watson*. Pengujian *Durbin-Watson* menggunakan batas atas dan batas bawah untuk menentukan kesimpulan ada tidaknya masalah otokorelasi.

**Tabel 0.6 Hasil Uji Otokorelasi**

<i>Model</i>	<i>Durbin-Watson</i>
<i>Common Effect Model</i>	2,235848

*Sumber: Hasil Pengolahan Eviews*

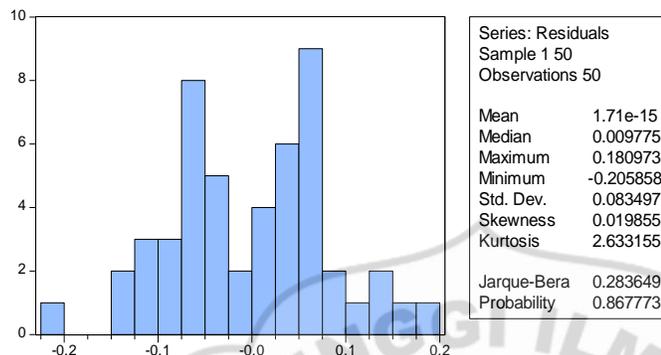
Pada Tabel 4.8 memperlihatkan hasil pengujian Otokorelasi dengan menggunakan *Durbin-Watson* sebesar 2,235848. Dilihat bahwa hasil Uji *Durbin-Watson* berada diantara batas 1,54 sampai 2,46 maka pada pengujian ini dapat disimpulkan bahwa data penelitian menerima  $H_0$ . Hasil pengujian menerima  $H_0$ , maka model CEM tidak mengandung masalah Otokorelasi.

### 1. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak, ketika salah satu syarat dalam model regresi adalah Uji Normalitas. Pada penelitian ini, pengujian Normalitas menggunakan Uji Jarque-Bera. (Winarno, 2015) Uji Jarque-Bera adalah uji statistic untuk mengetahui apakah data berdistribusi Normal. Uji ini menggunakan *skewness* dan *kurtois* data dan dibandingkan dengan apabila datanya bersifat normal. Jika Nilai Jarque-Bera lebih rendah daripada dua ataupun tidak signifikan, maka data tersebut berdistribusi normal dan atau hasil pengujian memiliki probabilitas bernilai lebih tinggi dari 0,05, dapat diartikan bahwa variabel pada penelitian tersebut berdistribusi normal. Dibawah ini adalah Hasil dari pengujian Normalitas yang berasal dari variabel-variabel penelitian:

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**Tabel 0.7 Hasil Uji Normalitas**



Sumber: Hasil Pengolahan Eviews

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa Hasil Uji Normalitas dengan menggunakan cara Uji Jarque-Bera, yakni menghasilkan Nilai Jarque-Bera sebesar 0,283649 dengan nilai Probabilitas sebesar 0,867773. Dapat disimpulkan data berdistribusi Normal, dikarenakan Nilai yang dimiliki oleh Jarque-Bera tidak signifikan atau kurang dari dua, serta probabilitas yang dihasilkan berhasil melampaui tingkat signifikan 5%.

## Analisis Regresi Berganda

Model regresi estimasi memiliki tiga jenis yang dihasilkan oleh analisis regresi data panel. Pada pengujian pemilihan model sudah ditentukan model terbaik yang akan digunakan pada penelitian adalah model *Common Effect Model*, yang berhasil ditentukan dari pengujian Chow dan pengujian Lagrange Multiplier. Pada pengujian Asumsi Klasik, menggambarkan bahwa CEM sangat konsisten terlihat dari hasil pengujian yang membuktikan bahwa model estimasi tersebut tidak mengandung masalah. Hal ini memberikan pandangan bahwa CEM sebagai model regresi estimasi terbaik untuk dipakai pada penelitian ini. Berikut adalah rangkuman singkat pengujian data panel:

**Tabel 0.8 Rangkuman Pengujian Model Data Panel**

		Common Effect Model	Fixed Effect Model
Konstanta	Koefisien	0,600101	-15,47294
	P-Value	0,5617	0,3679
LOG (PAD)	Koefisien	0,086429	0,067477
	P-Value	0,0002	0,0166
LOG (DBH)	Koefisien	0,123601	0,052842
	P-Value	0,0000	0,2351
LOG (DAU)	Koefisien	0,667009	1,363070
	P-Value	0,0000	0,0549

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LOG (DAK)	Koefisien	0,147597	0,124201
	P-Value	0,0000	0,0294
R <sup>2</sup>		0,952942	0,964185
Uji Chow	Koefisien	13,650497	
	P-Value	0,1353	
Uji Lagrange Multiplier	R <sup>2</sup>	0,995525	
	P-Value	0,6079	

Sumber: Hasil Pengolahan Eviews

Dilihat pada table 4.10 model CEM, Konstanta yang dimiliki menghasilkan Koefisien positif sebesar 0,600101 setelah dilogaritmakan, berarti setiap kenaikan seluruh variabel independen sebesar 1% maka terjadi penurunan sebesar 0,600101% pada Belanja Daerah. variabel PAD setelah dilogaritmakan menghasilkan koefisien positif sebesar 0,086429, yang artinya setiap kenaikan peningkatan PAD sebesar 1% maka akan meningkatkan Belanja Daerah sebesar 0,086429% serta mengasumsikan variabel yang lain bernilai konstan. Pada variabel DBH setelah dilogaritmakan menghasilkan koefisien yang positif berjumlah 0,123601, berarti setiap kenaikan DBH sebesar 1% akan menaikkan juga Belanja Daerah sebesar 0,123601% serta mengasumsikan variabel yang lain bernilai konstan. Variabel DAU memiliki nilai koefisien positif bernilai 0,667009 setelah DAU berhasil dilogaritmakan, hal ini menunjukkan setiap terjadi kenaikan pada DAU sebesar 1% maka meningkatkan Belanja Daerah sebesar 0,667009% serta mengasumsikan variabel yang lain bernilai konstan. Sebesar 0,147597 nilai koefisien positif variabel DAK setelah berhasil dilogaritmakan, setiap kenaikan DAK sebesar 1% maka variabel Belanja Daerah sebesar 0,147597% serta mengasumsikan variabel yang lain bernilai konstan.

Penelitian ini memperlihatkan respon terhadap perubahan Belanja Daerah yang diakibatkan oleh adanya perubahan DBH, PAD, DAK, serta DAU yang bersifat inelastis. 1% perubahan pada DBH, DAU, DAK, serta PAD mampu membuat perubahan kurang dari 1% pada Belanja Daerah dengan arah yang serupa.

## Uji Hipotesis

### Pengukuran Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>) digunakan untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam model regresi mampu menjelaskan variasi variabel independen. Dalam penelitian ini koefisien determinasi digunakan untuk mengukur kemampuan variabel PAD, DAU, DAK, dan DBH mampu menjelaskan variasi BD. Tabel 4.11 berikut ini besarnya koefisien determinasi model *common effects*.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**Tabel 0.9 Pengukuran Koefisien Determinasi**

R-square	Model
0,952942	<i>Common Effect</i>

*Sumber: Hasil Pengolahan Eviews*

Tabel 4.11 menggunakan Model *Common Effect*, dengan memiliki Nilai R-square sebesar 0,952942 yang menunjukkan besarnya nilai koefisien determinasi. Uji Koefisien Determinasi memberikan kesimpulan bahwa variasi Belanja Daerah yang dapat dijelaskan oleh PAD, DBH, DAU, serta DAK sebesar 95,2942% dan sisanya sebesar 4,7058% merupakan Belanja Daerah dijelaskan oleh variasi variabel model lainnya.

## **Uji Parsial**

Uji Parsial dipergunakan untuk menentukan tingkat signifikan pada setiap variasi variabel independen terhadap variabel dependen, dengan memberi tunjuk pengaruh terhadap setiap variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat. Pengujian untuk memperoleh Nilai Probabilitas variabel independen, selanjutnya nilai tersebut dibandingkan dengan nilai signifikan. Jika nilai signifikan lebih kecil dari pada nilai probabilitas yang diperoleh, maka  $H_0$  ditolak.  $H_0$  ditolak dapat menyimpulkan adanya variabel independen yang membawa pengaruh positif kepada variabel dependen. Berikut Hasil Uji Parsial Pada Penelitian:

**Tabel 0.10 Model Common Effect untuk Analisis Uji Parsial**

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0,600101	1,026548	0,584582	0,5617
LOG(PAD)	0,86429	0,021510	4,018179	0,0002
LOG(DBH)	0,123601	0,020989	5,888889	0,0000
LOG(DAU)	0,667009	0,048809	13,66558	0,0000
LOG(DAK)	0,147597	0,026575	5,553876	0,0000

*Sumber: Hasil Pengolahan Eviews*

Hasil Uji Parsial pada Tabel 4.12 memperlihatkan PAD memiliki probabilitas bernilai 0,0002 lebih kecil daripada tingkat signifikan 0,05. Sebab hasil pengujian menyimpulkan menolak  $H_0$ , maka pengujian ini menyimpulkan bahwa PAD pengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

Hasil Pengujian Parsial terhadap variabel Independen DBH terdapat pada Tabel 4.12 memperlihatkan probabilitas bernilai 0,000 lebih rendah daripada 0,05, dapat disimpulkan bahwa DBH berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

Variabel Independen DAU pada Tabel 4.12 menunjukkan Hasil Uji Parsial yakni menolak  $H_0$ , dikarenakan probabilitas yang dimiliki DAU bernilai 0,000 lebih

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

rendah daripada 0,05. Pengujian ini dapat disimpulkan bahwa DAU berpengaruh positif kepada Belanja Modal.

Variabel Independen DAK pada Tabel 4.12 menyimpulkan untuk menolak  $H_0$ , dikarenakan nilai probabilitas yang dimiliki DAK bernilai 0,000 lebih kecil daripada tingkat signifikan yang bernilai 5% maka dapat diartikan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

## 2. Uji Simultan (Statistik F)

Uji Simultan atau statistik F dimaksudkan untuk menguji apakah seluruh variabel independen mampu menjelaskan variasi nilai variabel dependen. Berikut adalah hipotesis Uji Simultan:

$H_0$ : Variabel Independen tidak dapat menjelaskan Nilai Variabel Dependen.

$H_A$ : Variabel Independen dapat menjelaskan Nilai Variabel Dependen.

Pengujian menerima  $H_0$  saat hasil menunjukkan besarnya nilai probabilitas F lebih besar daripada besarnya nilai tingkat signifikan yakni 5%, sebaliknya jika nilai probabilitas F menunjukkan nilai yang lebih rendah daripada nilai tingkat signifikan maka hasil uji Simultan menolak  $H_0$ .

**Tabel 0.11 Hasil Uji Simultan (Uji F)**

R-squared	0.952942	Mean dependent var	27.82985
Adjusted R-squared	0.948759	S.D. dependent var	0.384906
S.E. of regression	0.087129	Akaike info criterion	-
			1.948212
Sum squared resid	0.341617	Schwarz criterion	-
			1.757010
Log likelihood	53.70530	Hannan-Quinn criter.	-
			1.875401
F-statistic	227.8170	Durbin-Watson stat	2.235848
Prob(F-statistic)	0.000000		

Untuk mengetahui apakah semua variabel independen mampu menjelaskan variasi variabel dependen dapat dilihat dari nilai probabilitas F-Statistik. Hasil Uji simultan

*Sumber: Hasil Pengolahan Eviews*

pada CEM memperoleh nilai probabilitas F-Statistik 0,000000. Keputusan dalam pengujian ini adalah menolak  $H_0$ , karena nilai probabilitas F-Statistik yang diperoleh 0,000000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%. Pengujian ini menunjukkan bahwa variabel PAD, DBH, DAU, dan DAK mampu menjelaskan variasi Belanja Daerah (BD).

## Analisis Flypaper Effect

Flypaper Effect merupakan sebuah fenomena dimana Dana Perimbangan meliputi; DAU, DBH, dan DAK lebih banyak dipergunakan untuk membantu membiayai

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pengeluaran pemerintah daripada menggunakan PAD untuk membiayai pengeluaran. Variabel dependen yang dipergunakan dalam penelitian ini untuk melihat apakah ada tidaknya *Flypaper Effect*, adalah Belanja Daerah. Fenomena *Flypaper Effect* dapat terjadi ketika nilai koefisien yang dimiliki DAU lebih tinggi daripada nilai koefisien PAD, dan hasil analisis variabel independen lainnya signifikan tetapi variabel PAD tidak signifikan.

**Tabel 0.12 Hasil Estimasi Common Effect Model**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.600101	1.026548	0.584582	0.5617
LOG(PAD)	0.086429	0.021510	4.018179	0.0002
LOG(DBH)	0.123601	0.020989	5.888889	0.0000
LOG(DAU)	0.667009	0.048809	13.66558	0.0000
LOG(DAK)	0.147597	0.026575	5.553876	0.0000
R-squared	0.952942	Mean dependent var		27.82985
Adjusted R-squared	0.948759	S.D. dependent var		0.384906
S.E. of regression	0.087129	Akaike info criterion		-
				1.948212
Sum squared resid	0.341617	Schwarz criterion		-
				1.757010
Log likelihood	53.70530	Hannan-Quinn criter.		-
				1.875401
F-statistic	227.8170	Durbin-Watson stat		2.235848
Prob(F-statistic)	0.000000			

*Sumber: Hasil Pengolahan Eviews*

Pada tabel 4.14 memperlihatkan bahwa probabilitas F-Statistic yang dimiliki bernilai 0,000000 lebih kecil daripada nilai tingkat signifikan 0,05 maka PAD dan Dana Perimbangan mampu menjelaskan variasi Belanja Daerah. Koefisien regresi yang dimiliki PAD adalah 0,086429 lebih rendah jika dibandingkan dengan koefisien regresi yang dimiliki oleh Dana Perimbangan; DAU memiliki Koefisien sebesar 0,667009, DBH memiliki Koefisien sebesar 0,123601, dan DAK memiliki Koefisien bernilai 0,147597. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Perimbangan memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah.

Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap BD dilakukan dengan membandingkan antara nilai probabilitas variabel independen dengan tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 5%. PAD memiliki nilai probabilitas 0,0002 dan probabilitas yang dimiliki Dana Perimbangan bernilai 0,0000, serta memiliki koefisien regresi yang bertanda positif. Probabilitas yang dimiliki PAD dan Dana Perimbangan lebih rendah daripada tingkat signifikan 5%, maka dapat disimpulkan bahwa PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah (BD).

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah**

Salah satu variabel penting yang menyebabkan terjadinya fenomena *flypaper effect* pada Belanja Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah atau biasa disingkat PAD. Pengujian parsial mempengaruhi variabel PAD dengan menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,086429 bernilai positif. Menunjukkan semakin tinggi PAD maka Belanja Daerah juga semakin tinggi, sebaliknya jika semakin rendah PAD yang dimiliki maka semakin rendah pula Belanja Daerah pada daerah tersebut. Nilai probabilitas bernilai 0,0002 lebih rendah daripada tingkat signifikan 0,05 maka PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Hal ini sesuai dengan salah satu penelitian terdahulu tahun 2017, Ernayani melakukan analisis fenomena *flypaper effect* pada provinsi Kalimantan Timur untuk periode 2009 hingga 2013 dengan memuat kesimpulan yang sama bahwa PAD membawa pengaruh positif kepada Belanja Daerah secara signifikan. Suatu daerah yang mempunyai PAD yang besar tidak mengalami kemunduran daerah, dikarenakan jika suatu daerah memiliki PAD yang tinggi maka daerah tersebut memiliki kemandirian yang tinggi dalam membangun daerah untuk menciptakan fasilitas-fasilitas penting dalam menunjang perekonomian daerah yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat salah satunya adalah Belanja Daerah.

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah**

Dalam rumusan hipotesis kedua, yaitu DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah (BD). Nilai probabilitas koefisien regresi DAU sebesar 0,0000 lebih rendah daripada tingkat signifikan 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap belanja Daerah. Nilai koefisien regresi yang dimiliki oleh DAU bernilai positif sebesar 0,667009. Artinya semakin tinggi DAU maka semakin tinggi Belanja Daerah. Sebaliknya, apabila DAU yang dihasilkan semakin rendah maka semakin rendah pula Belanja Daerah yang dimiliki. Hasil pengujian ini sependapat dengan analisis penelitian terkait *flypaper effect* periode 2015 di kabupaten/kota provinsi Banten yang diteliti oleh Amalia, memperlihatkan bahwa DAU membawa pengaruh positif kepada Belanja Daerah.

Dana Alokasi Umum atau sering disebut DAU diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah untuk membantu menyalurkan keseimbangan keuangan antar setiap daerah, dengan diberikannya DAU membantu pemerintahan daerah dapat dengan bebas mendanai kepentingan dan kebutuhan daerah tersebut. Hasil koefisien yang ditunjukkan DAU bernilai 0,667009 lebih besar daripada hasil koefisien PAD yakni bernilai 0,086429, maka disimpulkan bahwa DAU lebih banyak dipergunakan oleh pemerintahan daerah untuk mendanai Belanja Daerah dalam mencukupi kebutuhan dan kepentingan daerah NTB.

### **Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah**

Dana Bagi Hasil atau lebih dikenal dengan DBH, memiliki probabilitas dengan nilai 0,000 lebih rendah daripada tingkat signifikansi 0,05 menunjukkan DBH berpengaruh terhadap Belanja Daerah. DBH mempunyai nilai koefisien regresi positif bernilai 0,123601 menunjukkan bahwa semakin tinggi DBH yang dihasilkan maka semakin

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

tinggi juga Belanja Daerah. Kesimpulan penelitian ini serupa dengan hasil penelitian terkait *flypaper effect* pada kabupaten/kota di pulau Sulawesi periode 2016-2017 yang diteliti Armawaddin, Rumbi dan Afiat menyatakan bahwa DBH berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

Berkurangnya ketimpangan vertikal antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah, menjadi tujuan penting dialokasikannya DBH pada setiap daerah, dan pusat yang membutuhkan. Dibagikannya DBH dapat membantu meningkatkan keseimbangan antara pusat dan daerah untuk membantu dalam meningkatkan kebutuhan serta kepentingan sesuai dengan potensi daerah tersebut. Jika koefisien DBH dibandingkan dengan koefisien yang dimiliki oleh PAD, disimpulkan bahwa DBH kurang membawa pengaruh kepada Belanja Daerah daripada pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah, dikarenakan koefisien yang dihasilkan oleh DBH bernilai 0,123601 lebih tinggi daripada koefisien bernilai 0,086429 yang dimiliki oleh PAD.

## **Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah**

Koefisien yang dimiliki oleh DAK adalah 0,147597 dengan nilai probabilitas 0,000 lebih rendah daripada tingkat signifikansi 0,05 menunjukkan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Penelitian *flypaper effect* pada provinsi Kalimantan Timur, yang dilakukan oleh Deviyanti, Ferdiansyah, dan Pattisahusiwa pada tahun 2018 menunjukkan analisis yang selaras, yakni DAK berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

DAK berasal dari dana APBN yang dialokasikan langsung kepada setiap daerah untuk mendanai kebutuhan dan kepentingan daerah yang bersifat fisik maupun nonfisik. Adanya ketimpangan kebutuhan dan kepentingan daerah maka DAK dapat digunakan sebagai penambah dana bagi daerah yang kekurangan dana untuk dipergunakan dalam membangun daerah tersebut sesuai dengan kebutuhan, dan kepentingannya. Koefisien yang dihasilkan oleh DAK sebesar 0,147597 lebih besar daripada koefisien yang dimiliki oleh PAD sebesar 0,086429, maka dapat disimpulkan bahwa DAK memiliki dampak positif lebih besar terhadap Belanja Daerah daripada PAD.

## **Analisis Terjadinya Flypaper Effect pada Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat.**

Penggunaan dana transfer yang berasal dari pemerintahan pusat untuk mendanai keperluan Belanja Daerah dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan melebihi penggunaan PAD, merupakan salah satu potensi terjadinya fenomena *flypaper effect*. Penggunaan Dana Transfer sering kali lebih banyak dipergunakan oleh pemerintahan daerah dalam mendanai Belanja Daerah daripada penggunaan PAD, dikarenakan kurangnya pengaruh PAD pada tingkat perkembangan daerah, menyebabkan PAD tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Hasil pengolahan data penelitian memperoleh nilai probabilitas yang dimiliki oleh PAD ( $0,002 < 0,05$ ); DBH ( $0,000 < 0,05$ ); DAK ( $0,000 < 0,05$ ); DAU ( $0,000 < 0,05$ ). Hasil pengolahan data ini

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

menunjukkan bahwa keempat variabel tersebut berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Berikut merupakan perbandingan koefisien antara PAD dan Dana Perimbangan, Koefisien regresi DBH = 0,123601 lebih besar daripada koefisien regresi PAD = 0,086429; Koefisien regresi DAU = 0,667009 lebih besar daripada koefisien regresi PAD = 0,086429; Koefisien DAK = 0,147597 lebih besar daripada koefisien regresi PAD = 0,086429 menunjukkan syarat terjadinya fenomena *flypaper effect* pada penelitian ini telah terpenuhi dikarenakan PAD memiliki koefisien regresi yang lebih rendah daripada Dana Perimbangan (DAU, DAK, dan DBH).

Penelitian yang dilakukan oleh Nurdini, Wiratno, dan Farida mendukung hasil pengamatan, analisis adanya fenomena *flypaper effect* Provinsi Jawa Barat pada tahun 2014. Terjadinya *flypaper effect* pada provinsi Jawa Barat disebabkan oleh pembiayaan Belanja Daerah lebih banyak menggunakan Dana Perimbangan daripada PAD daerah tersebut, dilihat dari lemahnya pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah dibandingkan dengan dana perimbangan.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilaksanakan tahun 2014 oleh I Made P. Adiputra. Penelitian tersebut menganalisis fenomena *flypaper effect* kepada belanja daerah untuk kabupaten Karangasem, disimpulkan bahwa tidak ada *flypaper effect* pada kabupaten Karangasem, dikarenakan PAD yang dimiliki Karangasem lebih berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Serupa dengan penelitian yang diteliti oleh Bambang Agus Pramuka pada tahun 2010, disimpulkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Modal wilayah pulau Jawa, tetapi lemahnya pengaruh signifikan DAU terhadap Belanja Modal menyebabkan tidak terjadinya fenomena *flypaper effect* untuk Pulau Jawa.

## 5. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan terjadinya fenomena *flypaper effect* pada Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, ditentukan pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah dengan Dana Perimbangan kepada Belanja Daerah. Pengamatan penelitian ini menggunakan model *common effect* sebagai model terbaik pada data panel, dalam membantu mengolah 10 jumlah sampel periode 2014-2018. Hasil pengamatan mengungkapkan berbagai fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2014-2018. DAU merupakan Dana Perimbangan yang diberikan tanpa syarat oleh pemerintah untuk dipergunakan dalam rangka meminimalkan kesenjangan pembangunan pada setiap daerah, sehingga penggunaan DAU sering kali lebih banyak dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan daerah melebihi penggunaan PAD, hal ini terlihat dari tingginya koefisien regresi yang dimiliki DAU lebih besar daripada koefisien dimiliki PAD.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3. DAK berpengaruh terhadap Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2014-2018.
4. DBH Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2014-2018 berpengaruh terhadap Belanja Daerah.
5. Pada Analisis *flypaper effect* ditunjukkan bahwa koefisien regresi yang dimiliki Dana Perimbangan jauh lebih tinggi daripada koefisien regresi yang dimiliki oleh PAD, hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat lebih banyak menggunakan Dana Perimbangan daripada Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai Belanja Daerah. Penelitian ini berhasil membuktikan *flypaper effect* Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2014-2018.

## Saran

Kendala yang dialami oleh penelitian ini merujuk pada penulis hanya menggunakan sebuah provinsi dengan 10 kabupaten/kota dan 2014-2018 periode sebagai data yang dimilikinya, diharapkan pada peneliti selanjutnya dapat menambah periode, dan provinsi sebagai data dipenelitian. Merekomendasi kepada pemerintah khususnya Pemerintah Nusa Tenggara Barat, diharapkan dengan adanya fenomena *flypaper effect* dapat meningkatkan kemandirian daerah dalam menggali potensi yang dimiliki dengan tidak hanya mengandalkan dana perimbangan sebagai sumber pendanaan kebutuhan dan kepentingan daerah. Dana Perimbangan yang diberikan kepada pemerintah disarankan untuk dipergunakan sebagai dana bantuan dalam menambah pembangunan fasilitas-fasilitas, dan sumberdaya lainnya untuk dipergunakan membantu meningkatkan pendapatan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, I. M. P. (2014). Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Karangasem. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika (Jinah)*.
- Afrizawati. (2012). Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Dan Informasi Akuntansi (Jenius)*.
- Agus Pramuka, B. (2010). Flypaper Effect Pada Pengeluaran Pemerintah Daerah Di Jawa. In *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Algifahri. (2016). *Statistika Induktif Untuk Ekonomi Dan Bisnis*. Upp Stim Ykpn.
- Algifahri. (2018). *Modul Data Panel*. Hak Cipta Stie Ykpn.
- Amalia, F. (2015). Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Banten. *Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Banten*, 11(1), 15–25.
- Amalia, F. (2017). Flypaper Effect Of Regional Expenditure And It's Impact To

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Regional Inequality In Indonesia. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*.  
<https://doi.org/10.15408/sjie.v6i1.3293>

Armawaddin, M., Rumbia, W. A., & Afiat, M. N. (2017). Analisis Flypaper Effect Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Sulawesi Flypaper Effect Analysis Of District And City Regionally Spending In Sulawesi. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*.

Devita, A., Delis, A., & Junaidi. (2014). Pengujian Akan Belanja Daerah Pada Provinsi Jambi. *Pengujian Akan Belanja Daerah Pada Provinsi Jambi*.

Dewi, S. P., & Suyanto, S. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi*.  
<https://doi.org/10.24964/ja.v3i1.40>

Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. (2020).  
<http://www.djpk.kemkeu.go.id/>

Ekawarna, S. U. (2017). Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Daerah (Studi Komparasi Daerah Induk Dan Pemekaran Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi). *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*.

Ernayani, R. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Pada 14 Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013). *Jshp (Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan)*.  
<https://doi.org/10.32487/jshp.v1i1.234>

Ferdiansyah, I., Deviyanti, D. R., & Pattisahusiwa, S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah. *Inovasi*. <https://doi.org/10.29264/jinv.v14i1.3546>

Fitriana, N., & Sudarti, S. (N.D.). *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Dan Jumlah Penduduk Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau*.

Iskandar, I. (2012). Flypaper Effect Pada Unconditional Grant. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*.  
<https://doi.org/10.23917/jep.v13i1.186>

Nabilah, A. N., Soelistyo, A., & Kusuma, H. (2016). Analisis Flypaper Effect Pada Dan Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2014. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. <https://doi.org/10.22219/jep.v14i2.3894>

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Rahmawati, L. A., & Suryono, B. (2015). Flypaper Effect Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*.
- Rini Nurini, Adi Wiratno, Y. N. F. (2014). Analisa Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Daerah Di Pada Kabupaten /Kota Di Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*.
- Sasana, H. (2011). Analisis Determinan Belanja Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Dalam Era Otonomi Dan Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (Jbe)*.
- Siregar, B. (2015). Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua). Edisi. In *Laporan Realisasi Anggaran Adalah Laporan Yang Menyajikan Ikhtisar Sumber, Alokasi, Dan Penggunaan Sumber Daya Kas Yang Dikelola Oleh Pemerintah Dalam Suatu Periode. Laporan Realisasi Anggaran Merupakan Bentuk Ketaatan Pemerintah Terhadap Apbn/Apbd*.
- Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, Alfabeta, Cv. \_\_\_\_ (2016).
- Winarno, W. W. (2015). *Eviews*. Upp Stim Ykpn.